



Pembukaan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Angkatan II

Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE, MM. mengalungkan tanda peserta kepada salah satu perwakilan peserta Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Untuk Anggota DPRD Provinsi Angkatan II di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI pada Selasa (25/11), (selengkapnya hal. 5)

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Pemuda Angkatan VIII



Foto : Humas Lemhannas RI

Lemhannas RI kembali menyelenggarakan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kalangan pemuda pada Senin (24/11) di Ruang Gajah Mada, Gedung Panca Gatra Lemhannas RI. Kegiatan pembekalan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA tersebut diselenggarakan selama 7 hari di Lemhannas RI dan ditutup di Sukabumi.

Budi Susilo Soepandji dalam kesempatannya mengatakan bahwa nilai-nilai kebangsaan harus senantiasa dijaga demi utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keanekaragaman NKRI dalam suku bangsa, bahasa, dan budaya dapat menjadi potensi positif, namun juga berpotensi konflik bagi kesatuan bangsa bila salah dalam mengelolanya. "Pemuda memiliki peran aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui ikatan satu nusa satu bangsa." Jelasnya.

Peran penting pemuda telah tercatat dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan bangsa melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2014, yang merupakan momentum pemuda dalam menegakkan NKRI.

Pemuda merupakan garda terdepan untuk mencapai tujuan nasional sehingga keberadaannya di era modern ini menjadi penentu Indonesia di masa yang akan datang. Keberadaan pemuda di masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat luas sehingga mendukung terciptanya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Pembekalan yang menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi pembinaan karakter, dan *outbound* ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 73 laki-laki dan 27 perempuan yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan maupun perguruan tinggi seperti Komite Mahasiswa Pemuda Aceh, KNPI Malaysia, KNPI Maluku, KNPI Sulawesi Tenggara, KNPI Kalimantan Utara, dan BEM Universitas 17 Agustus.

DAFTAR ISI



2 Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Pemuda Angkatan VIII



3 Ceramah Anti Korupsi kepada Anggota DPRD Provinsi



3 Komitmen Anggota DPRD Provinsi Angkatan I



4 Pentingnya Pendidikan Partai politik di Lemhannas RI



5 Pembukaan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Angkatan II



6 Coffee Morning bersama Awak Media



7 Indonesia Scenarios to 2045



8 Syukuran Dalam Rangka Memperingati HUT Ke-43 Korpri Di Lemhannas RI



9 Sarasehan Peningkatan Kualitas Program Pendidikan



10 Diskusi Lemhannas RI - Biro Tata Negara Malaysia



11 Seminar Nasional IKAL - BKKBN



12 Lemhannas RI Rintis Laboratorium Kepemimpinan

REDAKSI

Pengarah :

Komjen Pol Boy Salamuddin

Penanggung Jawab :

Laksmi TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.

Redaktur :

Wahyu Widji Pamungkas S.Kom., MM.

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Maghoni.

Redaktur Pelaksana :

Trias Noverdi, S.S., Aditya Solehah S.Hum, Aska Leonardi, M. I.

Kom, Erlin Dyah Pratiwi S.Hum.

Desain

Bambang Iman Aryanto, S.T.

Fotografer :

Suryadi, Sertu Mar Suyono, Dwi Jayanto

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indiah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan

No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Ceramah Anti Korupsi kepada Anggota DPRD Provinsi

Jumat (21/11), para anggota DPRD Provinsi mendapatkan materi anti korupsi dari pejabat dua lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Bertempat di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung Panca Gatra Lemhannas RI, acara tersebut dikemas dengan diawali paparan dari narasumber dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab.

Dalam acara tersebut, Ketua BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Aziz M.A. mengemukakan bahwa selama ini BPK telah melakukan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun demikian, masih ada sejumlah perbedaan hasil audit antara BPK dan internal.

Selain itu, sistem hukum dan perundang-undangan masih harus dibangun dan dilengkapi untuk menghindari permasalahan dalam penyelesaian sengketa antar lembaga, misalnya masalah piutang BUMN/BUMD yang merupakan piutang negara masih memakai Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Harry mengatakan perlu adanya pemeriksaan yang lebih holistik ke depannya. Harry kemudian berjanji, akan memperbaiki internal BPK sehingga dapat berperan secara optimal dalam ranah eksternal.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, dalam uraiannya memaparkan realitas Indonesia seiring dengan perubahan zaman. Secara tak sadar, Indonesia telah 'dijajah' bangsa asing melalui

imperialisme, kolonialisme, dan globalisasi. Hal ini terlihat misalnya dari pemilihan produk atau jasa luar negeri yang lebih digemari dari pada produk atau jasa dalam negeri.

Giri menyayangkan bahwa keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan oleh Indonesia, akhirnya berpindah tangan ke negara tetangga. Selain itu, Giri juga menghimbau para anggota DPRD sebagai pejabat pemerintah, agar menghindari berbagai jenis korupsi seperti suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan karena hal itu akan merugikan negara maupun diri sendiri.

Di akhir sesi tanya jawab, Giri mengajak semua peserta yang hadir dalam ruangan itu untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Pusaka guna memupuk semangat nasionalisme.



Foto : Humas Lemhannas RI

Komitmen Anggota DPRD Provinsi Angkatan I

Pembekalan dan Pematapan Wawasan Kebangsaan bagi Anggota DPRD Provinsi, ditutup secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI pada Senin (24/11). Pada upacara penutupan ini turut hadir Wakil Gubernur, Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Melihat tugas dan tanggung jawab yang makin tinggi dan kompleks sebagai anggota legislatif di era demokrasi, Gubernur Lemhannas RI mengingatkan bahwa adanya kemungkinan terjadinya tarik-menarik kepentingan. "Kemungkinan yang terjadi harus disikapi dengan bijaksana agar tidak menimbulkan efek negatif yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa", ucapnya.

Diharapkan selepas pembekalan dan pematapan wawasan kebangsaan ini, peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan yang telah diperoleh dan kembali melanjutkan tugas dengan menumbuhkembangkan kebersamaan dan sinergitas baik dengan sesama anggota DPR RI maupun *stakeholder* lainnya.

Dalam acara penutupan tersebut, diselingi testimoni pesan

dan kesan dari perwakilan peserta yang telah mengikuti kegiatan pembekalan dan pematapan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini, bagi peserta sangat bermanfaat untuk mempererat dan menjaga jalinan silaturahmi yang telah terbentuk yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangun sinergitas dalam penugasan. Dalam kesempatan pasca pembekalan ini, peserta membacakan komitmen bersama untuk menjadikan pengetahuan dan wawasan yang telah diterimanya sebagai bekal dalam pengabdian di tengah-tengah masyarakat.



Foto : Humas Lemhannas RI

Pentingnya Pendidikan Partai Politik di Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Senin (24/11), Lemhannas RI bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar acara dialog kebangsaan mengenai "Pentingnya Pendidikan Partai Politik di Lemhannas RI" dalam program Indonesia Pagi yang disiarkan secara langsung oleh RRI.

Dialog yang melibatkan peserta pembekalan dan pematapan wawasan kebangsaan dari Provinsi DKI Jakarta, Lampung dan Jawa Timur tersebut, mengambil tempat di Ruang Syailendra Auditorium Mini Gedung Astagatra Lt. III Barat, Lemhannas RI dengan dipandu oleh moderator Maulana Isnarto.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan bahwa sebenarnya para anggota DPRD Provinsi sudah memiliki wawasan kebangsaan. Untuk meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu diselenggarakan program pembekalan dan pematapan wawasan kebangsaan di Lemhannas. Budi Susilo Soepandji juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan untuk dapat memberikan pendidikan di luar wawasan kebangsaan, misalnya pendidikan tentang partai politik (parpol).

Menurut Murdadi yang berasal dari DPRD Lampung, sebagai salah satu tempat pelatihan yang paling dipercaya oleh kalangan partai politik, Lemhannas RI juga diharapkan dapat menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) untuk parpol, tokoh masyarakat, pelajar, dan kalangan yang lebih luas.

Senada dengan Murdadi, Syarifudin dari DPRD DKI Jakarta juga mengungkapkan bahwa kegiatan pematapan harus dimulai dari kader terlebih dahulu, karena dari kaderlah kelak muncul menjadi pemimpin. Para peserta berharap, Lemhannas RI dapat bekerja sama dengan parpol-parpol dan juga kementerian-kementerian untuk dapat memberikan pelatihan dalam jangkauan yang lebih luas lagi.

Sementara itu, Murdadi dari DPRD Lampung juga menyampaikan tentang permasalahan mengenai perbedaan kepentingan parpol dan kepentingan masyarakat perlu diatasi dengan cara kembali ke fungsi regulasi, fungsi interpelasi, dan fungsi penganggaran. Untuk

mewujudkan hal itu, Yuzrizal dari DPRD Lampung berpendapat bahwa sangat diperlukan peran aktif masyarakat yakni melihat, memperhatikan, mengawasi, dan mengingatkan para anggota parpol itu sendiri.

Mirzali dari DPRD Lampung melihat, bahwa seiring perkembangan zaman, terdapat pergeseran nilai-nilai kebangsaan yang muncul dari kalangan parpol. Ia juga menambahkan bahwa kondisi internal parpol juga perlu dibenahi, seperti proses rekrutmen, kaderisasi dan sebagainya. Hal tersebut penting sekali, mengingat tugas DPRD adalah menyusun Peraturan Daerah yang notabene memerlukan personil dengan kompetensi tertentu. Hal sependapat diungkap oleh Eva Dwiana dari DPRD Lampung, bahwa perlu pendidikan etika bagi anggota parpol agar bersikap pro-rakyat juga penting untuk dimiliki.

Dalam satu kesempatan, Deputi Pematapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mayjen TNI Nasir Madjid menyampaikan bahwa pentingnya kegiatan pematapan wawasan kebangsaan telah disadari dan menjadi tanggung jawab moral bagi Lemhannas RI. Oleh karenanya, sejak 2013 Lemhannas telah melaksanakan kegiatan pematapan wawasan kebangsaan terhadap 14 Provinsi di Indonesia bekerjasama dengan Kesbangpol Linmas dan ToT untuk birokrat, akademisi, kepemudaan, dan tokoh agama.

Sementara menanggapi permintaan para wakil rakyat atas pemerataan kegiatan pembekalan dan pematapan tersebut, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Laksda TNI Leonardi melihat terdapat kendala diantaranya luas wilayah, sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan, dan dukungan anggaran. Leonardi menambahkan bahwa Lemhannas RI telah memiliki rencana perluasan jangkauan pematapan wawasan kebangsaan hingga ke tingkat kabupaten.

Dialog kebangsaan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui telepon antara lain dari Solo, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Gorontalo yang menyatakan tentang pentingnya peran Lemhannas RI dalam meningkatkan rasa nasionalisme maupun persepsi mereka tentang kinerja DPRD.

Pembukaan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Angkatan II



Selasa (25/11), Lemhannas RI menggelar acara Pembukaan Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Untuk Anggota DPRD Provinsi Angkatan II di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI.

Dalam acara ini, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE, MM. memimpin upacara pembukaan tersebut. Turut hadir dalam acara itu Sekretaris Utama, Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Dede Rusamsi menyampaikan bahwa Indonesia lahir melalui kesepakatan bersama dari bangsa yang memiliki perbedaan suku bangsa, agama, ras, dan budaya. "Keragaman harus dikelola oleh pemimpin nasional sebagai potensi dalam upaya memelihara persatuan bangsa demi utuh dan tegaknya NKRI. Sikap ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah masing-masing," jelasnya

Empat konsensus dasar nasional yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sessanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan kesepakatan bersama dalam mengelola kemajemukan bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan sikap persatuan dan kesatuan.

Nilai dan sikap tersebut juga terkandung dalam wawasan kebangsaan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh para pemimpin di berbagai tingkatan. Sebagai anggota DPRD Provinsi yang mengemban amanat dari rakyat, rasa persatuan

dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan sangat diperlukan agar tidak terjebak pada politik kepentingan kelompok maupun golongan.

Pentingnya pengetahuan wawasan kebangsaan juga termaktub dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia harus dapat berjaya di sektor kelautan dan maritim. Hal ini berdasarkan pemahaman tentang kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis tersebut melahirkan konsepsi wawasan nusantara bahwa laut bukanlah pemisah, tetapi sebagai penghubung.

Dengan mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan pimpinan bangsa dan kerelaan untuk menyatukan diri pada visi nasional yaitu Negara Indonesia adalah sebagai negara maritim, maka Indonesia akan dapat berjaya di sektor maritim.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dari seluruh komponen bangsa, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selain sektor kemaritiman, aspek agraris dan visi kedirgantaraan juga perlu dikembangkan.

Acara pembukaan ini dihadiri oleh 76 peserta yang merupakan anggota DPRD dari 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Seluruh peserta diharapkan dapat benar-benar memahami dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam melaksanakan peran di lembaga legislatif provinsi. Selain itu juga, diharapkan peserta dapat mengimplementasikannya di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Coffee Morning Bersama Awak Media

Jumat (28/11) Lemhannas RI menyelenggarakan acara *Coffee Morning* di Ruang Gatot Kaca Gedung Astagatra Lemhannas RI. Acara tersebut dibuka oleh Kabag Humas, Ir. Yusita Pusparini, M.Sc. yang mewakili Kepala Biro Humas Lemhannas RI.

Sebanyak 34 wartawan dari media cetak, media online, radio, dan televisi turut hadir dalam acara yang menghadirkan narasumber Maulana Isnarto, penyiar RRI.

Yusita Pusparini dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa acara ini bertujuan untuk menggali berbagai masukan dari awak media tentang rencana membentuk komunitas media (forum wartawan) di Lemhannas RI.

Selain itu, ia juga menyampaikan harapan atas partisipasi aktif para peserta dalam memberi sumbang pikir tentang bagaimana meningkatkan efektifitas peran komunitas media dalam mensosialisasikan kegiatan penting Lemhannas.

Dalam forum diskusi, Irfan dari hariannasional.com memberi masukan agar media diberi kebebasan dalam menyiarkan berita tentang Lemhannas RI. Sementara itu, Yudi dari Jurnal Jakarta mengatakan bahwa forum wartawan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan kewenangan tertentu.

Selain struktur organisasi, Arini dari beritabuana.com juga menyarankan untuk membuat milis untuk memudahkan penyampaian informasi tentang kegiatan-kegiatan Lemhannas RI. Merry dari silangmonas.com juga menyampaikan perlunya disediakan ruangan khusus untuk pers yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jurnalistik.

Menanggapi masukan-masukan tersebut, Maulana menyampaikan bahwa permasalahan penting yang dihadapi seluruh kementerian dan lembaga adalah anggaran untuk memfasilitasi komunitas media tersebut. Namun Yusita tidak menampik, untuk *press room* keberadaannya tengah diupayakan.



Foto : Humas Lemhannas RI

Indonesia Scenarios to 2045



Kamis (4/12), Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan acara *Round Table Discussion* (RTD) bertema "Indonesia Scenarios to 2045" di Ruang Kresna, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Diskusi yang dimoderatori oleh alumni PPRA 52 Lemhannas RI Dr. Yosefina Rasyanti Munthe, MA. Psi, menghadirkan narasumber Prof. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc., Dr. J. Kristiadi, Daud Dharsana, La Ode Ida, Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaluddin, Prof. Mubariq Ahmad, Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S., Prof. Dr. Rizaldi Boer, Prof. Darmin Nasution, S.E., Phd, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, Dr. Arif Budimanta dan Dr. Makarim Wibisono.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa, skenario ini membantu kita untuk mengenali berbagai kemungkinan peristiwa yang akan terjadi untuk selanjutnya menghasilkan kebijakan dan strategi yang relevan.

Dalam kaitannya dengan skenario Indonesia di tahun 2045, Lemhannas RI merasa memiliki kepentingan dan tanggung jawab moral terhadap kondisi Indonesia di tahun 2045 karena keberadaan dan integritas bangsa Indonesia merupakan fokus utama yang harus diperhatikan.

Skenario Indonesia tahun 2045 merupakan perkiraan gambaran kondisi Indonesia di tahun 2045. Aspek yang dikaji, antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam paparannya, tim penyusun skenario menyampaikan kesimpulan sementara, di antaranya yaitu

generasi baru Indonesia pada tahun 2045 mempunyai cara pandang berbeda dengan generasi sebelumnya dan menduduki ranah politik serta bisnis, pusat perekonomian dunia bergeser dari wilayah Eropa ke Asia Pasifik, dan terjadinya kemerosotan kondisi sosiologi dan budaya serta menipisnya rasa nasionalisme yang mengarah kepada terjadinya disintegrasi bangsa.

Para narasumber menyampaikan pendapatnya dalam rangka penyempurnaan skenario, di antaranya adalah, Prof. Mubariq Ahmad, Akademisi UI yang memberikan masukan tentang metodologi yang digunakan dalam menentukan *vocal concern* serta fokus penelitian skenario.

Selain itu, Prof. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berpendapat bahwa skenario bukanlah kisah, tetapi hal-hal apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, tim peneliti harus menentukan satu fokus utama atau *vocal concern* agar penelitian lebih terarah dalam menjabarkan hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi.

Sependapat dengan Dr. Mubariq Ahmad dan Prof. Azyumardi Azra, J. Kristiadi, Pengamat Politik CSIS juga mengatakan bahwa penting untuk menentukan *vocal concern* skenario ini. Pembentukan skenario harus berpedoman kepada cita-cita bangsa Indonesia. Sementara itu, Dr. Makarim Wibisono dari Indonesian **Council of World Affairs** (ICWA), mengungkapkan bahwa skenario harus dibentuk berdasarkan impian para pendiri bangsa dan harus berkelanjutan dari generasi ke generasi guna mewujudkan cita-cita yang sama.

Syukuran Dalam Rangka Memperingati HUT Ke-43 Korpri Di Lemhannas RI



Senin (1/12), Lemhannas RI menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Ruang Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Para Pejabat Struktural, dan segenap anggota Lemhannas RI.

Gelaran syukuran tersebut diselenggarakan usai Gubernur Lemhannas RI beserta beberapa pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI mengikuti Upacara HUT ke-43 Korpri di Lapangan Monas. Upacara HUT ke-43 Korpri tahun ini bertema "Melalui Peringatan HUT Ke-43 Korpri Tahun 2014 Kita Sukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Negara". Presiden Joko Widodo yang bertindak selaku inspektur upacara menghimbau agar Korpri terus berintegrasi dan bersinergi serta meninggalkan ego sektoral; dan dapat bersama-sama melanjutkan pembangunan bangsa dengan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Sedangkan dalam syukuran HUT ke-43 Korpri di Lemhannas RI mengangkat tema "Memperkokoh Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berintegritas Guna Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat". Dalam acara syukuran tersebut, Ketua Dewan Pengurus Korpri drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, M.M. menyampaikan laporannya tentang kinerja

Dewan Pengurus Korpri Tahun 2012-2014.

Menurut Sri Wahyuni, selama periode 3 tahun kepemimpinannya, Dewan Pengurus Korpri telah melakukan berbagai kegiatan, misalnya musyawarah Korpri, pengukuhan pengurus Korpri, penyerahan beasiswa, kegiatan motivasi, seminar nasional, *joy sailing* KRI 592 Banjarmasin, donor darah, kunjungan ke Lapas wanita Tangerang, dan ziarah ke TMP Kalibata.

Budi Susilo Soepandji dalam sambutannya berharap Korpri yang merupakan wadah para PNS, harus lebih meningkatkan kinerja dan upaya penataan birokrasi, baik dalam aspek lembaga, aparatur, maupun anggaran. Salah satu upaya untuk melakukan kembali penataan guna mewujudkan birokrasi yang bersih yaitu dengan merujuk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Dalam waktu dekat, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps ASN yang dimaknai sebagai peluang dan tantangan individu aparatur untuk berkompetisi sesuai dengan kompetensinya dengan memperhatikan 5 poin penting yaitu: (1) peningkatan wawasan melalui pemanfaatan perpustakaan dan internet, (2) pelaksanaan program yang telah direncanakan, (3) pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi, (4) penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, dan (5) pemberian pelayanan sebaik mungkin.

Sarasehan Peningkatan Kualitas Program Pendidikan

Selasa (9/12) Lemhannas RI menyelenggarakan Sarasehan Peningkatan Kualitas Program Pendidikan di Ruang Syailendra Gedung Astagatra Lemhannas RI. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, dan para pejabat struktural di lingkungan Lemhannas RI.

Dalam kegiatan sarasehan yang diikuti para Tenaga Ahli Pengajar, para Tenaga Ahli Pengkaji, para Tenaga Profesional, dan pejabat struktural, pada dasarnya merupakan kegiatan evaluasi rutin akhir tahun sebagai salah satu kegiatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja lembaga melalui program pendidikan, pengkajian maupun pemantapan nilai kebangsaan.

Ada tiga sasaran pokok yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan sarasehan, yaitu: meningkatkan kualitas pendidikan khususnya proses pembelajaran; menghasilkan metode pembelajaran yang terbaik dengan berbasiskan kebutuhan peserta dan meningkatnya

kualitas para tenaga pengajar, tenaga pengkaji, tenaga profesional serta tutor pembimbing peserta didik Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Budi Susilo Soepandji mengatakan bahwa, penyelenggaraan sarasehan kali ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan pimpinan tingkat nasional. Sementara itu dalam penjelasannya, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Laksda TNI Ir. Leonardi, M.Sc. mengatakan bahwa sarasehan yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 9-11 Desember 2014 ini diharapkan dapat menjadi ajang sharing dan peninjauan ulang materi-materi dalam program pendidikan guna terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih baik.

Ia juga berharap pada kesepakatan akhir yang dirumuskan dan dihasilkan dalam sarasehan ini, dapat di-implementasikan secara sungguh-sungguh agar berbagai permasalahan yang ada dapat dihindari dan tidak berulang dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI

Diskusi Lemhannas RI - Biro Tata Negara Malaysia

Senin (8/12), Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh empat pejabat Lemhannas RI menerima kunjungan Tim dari Biro Tata Negara (BTN) Malaysia yang beranggotakan enam orang dalam sebuah *courtesy call*. Selanjutnya, acara diteruskan dengan diskusi yang mengambil tempat di Ruang Nusantara II, Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Diskusi yang dipimpin oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Laksda TNI Ir. Leonardi, M.Sc. tersebut, dihadiri antara lain oleh Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Geopolitik Mayjen (Purn) TNI Endang Haerudin, S.T. M.M; Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc; Kepala Biro Kerma Brigjen TNI Sudiby, S.E; dan Kasubditjian internasional Kolonel Sus Dr. Ir. Rudy Gultom, M.Sc. Sementara dari BTN Malaysia adalah H. Zainal Abidin bin Abu Hasan, Mohd Noor Rashid, Mohd Khailani bin Ismail, Hamizi Yakub, Muhammad Syafarin bin Shaari, dan Ahmad Nabi dari BTN.

BTN Malaysia merupakan departemen di bawah Perdana Menteri Malaysia yang telah berdiri sejak 1974 yang berfokus pada pembangunan nasional dalam memupuk nilai-nilai nasionalisme. Kunjungan BTN Malaysia ke Lemhannas RI ini merupakan kunjungan persahabatan yang bertujuan untuk mengenal Lemhannas RI lebih dekat guna menjalin kerja sama yang lebih erat.

Dalam sesi diskusi bertajuk "Peningkatan Pengetahuan dan

Pemahaman terhadap Patriotisme" ini, Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Geopolitik Lemhannas RI Mayjen TNI Purn. Endang Haerudin, S.T. M.M mengajukan pertanyaan mengenai jenis materi yang diberikan kepada peserta pelatihan dan kaitan antara materi dari BTN dengan kurikulum di sekolah/universitas.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hamizi Yakub selaku Pengarah Tata Negara Negeri Pahang, menjelaskan materi yang diberikan tergantung kepada peserta pelatihan, misalnya tentang nilai-nilai murni moral bangsa, Lima Rukun Negara Malaysia, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, materi pelatihan dari BTN dan nilai-nilai Lima Rukun Negara Malaysia masih belum dapat diimplementasikan ke dalam materi sekolah, seperti layaknya di Indonesia. Oleh karena itu, BTN ingin mempelajari tentang penanaman nilai-nilai nasionalisme di Lemhannas RI.

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas Lemhannas RI Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc. menyampaikan rencana kunjungan tim roadshow Lemhannas RI ke Malaysia pada tanggal 18-20 Desember 2014 mendatang. Tujuannya yaitu untuk menjajaki kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengkajian strategis. H. Zainal Abidin bin Abu Hasan menyambut baik rencana tersebut dan menganjurkan Lemhannas RI untuk melanjutkan perkenalan dengan BTN Malaysia guna mempererat kerjasama di masa depan.



Foto : Humas Lemhannas RI

Seminar Nasional IKAL-BKKBN



Katan Alumni Lemhannas RI (IKAL) bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar acara seminar nasional yang bertajuk “Momentum Bonus Demografi untuk Menyiapkan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia” pada Kamis (11/12), di Gd. Dwiwarna Lemhannas RI.

Seminar yang dimoderatori oleh Dr. Rosita S. Noer, M.A, menghadirkan beberapa narasumber yaitu Kepala BKKBN Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, Sp.GK, Kepala Lembaga Demografi UI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Kabaeskrim Mabes Polri Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Pelaksana Tugas (Plt.) Deputy Koordinasi Bidang SDM Menko Kematriman Dr. Safri Burhanudin, Asrena Kasal Laksda TNI Agung Pramono, S.H, M.Hum.

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A yang hadir sebagai pembicara kunci, mengatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ada tiga gatra yang perlu mendapatkan perhatian utama, yaitu gatra demografi, gatra ekonomi, dan gatra sosial budaya yang ketiganya berkaitan dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, dan infrastruktur. Akan tetapi, untuk dapat mewujudkan aspek-aspek tersebut secara optimal, dibutuhkan undang-undang untuk memayunginya agar tidak memicu konflik berkepanjangan.

Dalam seminar ini, para narasumber mengemukakan pendapatnya mengenai keterkaitan bonus demografi dengan poros maritim dunia, Fasli Jalal mengatakan bahwa peluang bonus demografi dapat direalisasikan dengan didukung oleh sektor pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan semangat kewirausahaan guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara Suhardi Alius juga mengatakan bahwa bonus demografi Indonesia bisa menjadi keuntungan maupun bencana, tergantung bagaimana mengelolanya. Hal ini diperkuat pernyataan Sonny Harry Budiutomo yang berpendapat bahwa bonus demografi harus dikelola dengan baik dan diharapkan memiliki kemampuan untuk mendukung bidang kemaritiman.

Agung Pramono sendiri menegaskan bahwa elemen kekuatan maritim yang berkaitan dengan demografi yakni jumlah penduduk dan karakter bangsa yang harus senantiasa dipantau dalam perkembangannya. Namun Safri Burhanuddin sedikit menyayangkan sekaligus mengingatkan bahwa dalam mewujudkan cita-cita poros maritim dunia, sangat penting untuk meningkatkan SDM, mengingat kondisi SDM Indonesia masih didominasi pendidikan dasar.

Pembangunan manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituntut untuk berperan aktif dalam pembinaan wawasan kebangsaan seperti yang tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah guna penyelenggaraan pendidikan berbasis wawasan kebangsaan yang senantiasa berorientasi semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. Apabila hal ini dapat dilakukan secara bersama dan konsisten, bonus demografi dapat menjadi *windows of opportunity* yang mendorong terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Lemhannas Rintis Laboratorium Kepemimpinan

Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI, Dede Rusamsi, SE, MM. membuka secara resmi acara *Round Table Discussion* (RTD) yang bertema “Mewujudkan Laboratorium Kepemimpinan Nasional Guna Menjawab Tantangan Global dalam Rangka Ketahanan Nasional”, pada Kamis (11/12) di Ruang Kresna Gedung Astagatra Lt. III Lemhannas RI.

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan Dede Rusamsi dikatakan bahwa faktor kepemimpinan nasional yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Konsep Kepemimpinan Nasional perlu dikaji secara mendalam melalui Laboratorium Kepemimpinan Nasional yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan riset, penelitian, pelatihan, dan pengukuran secara ilmiah. Untuk itu perlu didukung infrastruktur dan SDM yang memadai. Lebih lanjut dikatakan, bahwa SDM merupakan Assesor dari berbagai multidisiplin ilmu yang memiliki kompetensi untuk mencetak pemimpin yang berkompeten dan berwawasan global serta berkarakter kebangsaan.

RTD yang diselenggarakan ini merupakan langkah awal Lemhannas RI dalam merintis sebuah Laboratorium Kepemimpinan Nasional yang nantinya kedepan dapat menjawab tantangan dalam lingkup nasional, regional maupun global.

Hal yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah masih diperlukannya kriteria kepemimpinan secara standar maupun kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal. Selain itu, Laboratorium Kepemimpinan Nasional yang mencakup proses rekrutmen hingga proses pengembangan dengan mengedepankan *national leadership*

harus segera diwujudkan sebagai salah satu upaya Lemhannas RI mencapai *World Class Institution*.

Acara yang dimoderatori oleh Taji Bidang Kepemimpinan Lemhannas RI Mayjen TNI Purn. Hari Mulyono menghadirkan Dekan Fak. Psikologi Univ. Pancasila Dr. Silverius Sony Y. Soeharso, S.E, M.M, Psi, SGM ACI PT Telkom Indonesia Bandung Dra. Rini Lestari Utami, Direktur Utama Wika Satrian Leadership Center Bandung Ir. Tony Warsono, M.M, dan Peneliti LIPI Prof. Dr. Indria Samego, M.A. sebagai Pembicara.

Sementara sebagai Penanggap yaitu Kadis Psiko TNI AL Laksm TNI Drs. A. Burhan Wijaya, M.Si, Psi., Kadis Psiko TNI AU Marsma TNI Drs. Bago Purwanto, dan Perwakilan Psiko TNI AD Kol. Dr. Eri Radityawara Hidayat. RTD ini turut dihadiri oleh para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional dan beberapa Pejabat Struktural Lemhannas RI.



**Tim Redaksi Newsletter
Mengucapkan**

Selamat Hari Raya Natal

25 Desember 2014

dan

Selamat Tahun Baru

1 Januari 2015

